

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Krisis Balkan sempat mencuat pada dekade tahun 90an, dimana negara-negara eks Republik Yugoslavia satu per satu berusaha melepaskan diri. Seperti Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, dan hanya menyisakan Serbia-Montenegro. Kemudian yang terakhir ini adalah wilayah Kosovo yang memerdekakan diri dari Serbia. Mungkin Kosovo-lah yang dipandang mempunyai persoalan yang paling rumit diantara negara-negara eks Yugoslavia yang terlebih dahulu merdeka.

Pada awalnya Kosovo merupakan bagian dari wilayah Serbia yang mempunyai status otonomi. Namun sejak penyerangan NATO ke wilayah ini untuk mengusir Tentara Serbia pada tahun 1999, pemerintahan Kosovo yang carut marut di ambil alih oleh PBB. Dan sejak saat itu pula Kosovo berada dibawah pengawasan PBB dan Pasukan Keamanan KFOR (*Kosovo Force*). Beberapa upaya untuk membahas masalah ini telah diupayakan. Pembicaraan ataupun perundingan yang melibatkan para Diplomat Internasional tetap tidak dapat membuahkan hasil. Keinginan Kosovo untuk memerdekakan diri ditolak keras oleh Serbia.

Dan akhirnya pada tanggal 17 Februari 2008 secara unilateral Kosovo menyatakan kemerdekaannya. Hal ini menyebabkan reaksi keras dari Serbia yang sangat menentang kemerdekaan Kosovo. Kosovo berani mengambil

tindakan ini setelah mendapat dukungan penuh dari Amerika dan beberapa negara anggota Uni Eropa Namun, tidak sedikit pula negara yang menolak mengakui kemerdekaan Kosovo yang dilakukan secara sepihak.

Amerika selalu memberikan dukungan penuh dalam upaya kemerdekaan Kosovo, selain itu Amerika juga mempunyai andil dalam Operasi militer yang dilakukan oleh NATO di wilayah tersebut pada tahun 1999. Sikap Amerika yang demikian telah menarik perhatian penulis, sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul **“KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT ATAS KEMERDEKAAN KOSOVO”**. Sejauh ini Amerika telah memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan Kosovo dan akan menempatkan pos diplomatik di negara baru tersebut.

B. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui mengapa Amerika memberikan dukungan yang penuh atas upaya kemerdekaan bagi Kosovo dari Serbia.
- 2) Untuk mengetahui motif kepentingan Amerika di wilayah tersebut pada khususnya dan Eropa timur pada umumnya.
- 3) Untuk mengetahui kebenaran atas permasalahan yang terjadi, juga dimaksudkan untuk menjawab masalah dan merumuskan hipotesis yang ada.

Важнейшая часть жизни

1) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

2) Жизнь - это

3) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

4) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

5) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

6) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

7) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

8) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

9) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

2) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

3) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

4) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

5) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

6) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

7) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

8) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

9) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

10) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

11) Главная задача жизни - это достижение счастья и благополучия.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Kawasan Balkan merupakan daerah yang paling rawan konflik di kawasan Eropa. Wilayah Balkan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa negara yang mengintegrasikan diri dalam sebuah negara federasi yaitu Republik Federasi Yugoslavia. Negara-negara yang terintegrasi dalam Republik Federasi Yugoslavia satu demi satu melakukan disintegrasi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan etnis, ras dan agama. Yugoslavia merupakan negara bekas anggota Uni Soviet, sehingga sampai saat ini negara tersebut masih mengalami masa transisi setelah komunis. Dengan runtuhnya Uni Soviet, maka alasan ini yang menyebabkan AS terutama dan Eropa kemudian memasuki wilayah Balkan.

Adanya perbedaan yang semakin meruncing diantara negara-negara yang tergabung dalam Republik Federasi Yugoslavia, menyebabkan terjadinya Perang Sipil Yugoslavia atau biasa disebut Perang Balkan yang telah dimulai sejak tahun 1918, ketika negara tersebut pertama kali dibentuk. AS pun juga ambil bagian dalam Perang Balkan. Lebih dari 15 tahun, tiga Pemerintahan Amerika Serikat telah mencoba menciptakan kestabilan di wilayah Balkan yang selalu mengalami konflik berkepanjangan. Sejak awal konflik di Yugoslavia yaitu pada dekade 1990-an, Amerika Serikat berusaha membangun hubungan diplomatik yang baik di kawasan tersebut. Misalnya saja dengan menempatkan ribuan pasukan AS yang berada di wilayah itu yang merupakan relokasi pasukan dari wilayah Eropa Barat.

Konflik yang berkepanjangan antara negara-negara bagian Yugoslavia menyebabkan negara-negara itu benar-benar mengalami disintegrasi. Kemudian terbentuklah Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, dan Montenegro. Sekali lagi disintegrasi negara-negara bagian ini tak luput dari peran AS. Bahkan, AS pada bulan November 1990, pemerintahan Bush dan kongres mengesahkan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan luar negeri pada tahun 1991. Ketetapan ini berisi tentang penghentian pinjaman, kredit, dan beberapa hubungan dagang bagi negara bagian Yugoslavia jika tidak segera mendeklarasikan kemerdekaan dalam enam bulan ke depan. Selanjutnya, setelah terjadi disintegrasi negara-negara bagian Republik Federasi Yugoslavia, Kosovo yang terintegrasi dalam propinsi otonomi Serbia juga ingin terpisah dari Serbia. Dan sekali lagi AS hadir untuk menyelesaikan masalah Kosovo. Bersama NATO, AS melakukan intervensi masalah disintegrasi Kosovo atas Serbia.

Pada awalnya propinsi Kosovo secara de facto merupakan bagian dari wilayah Serbia yang mana adalah sebuah negara pecahan Republik Federasi Yugoslavia (sebelum tahun 2003 Serbia bernama Yugoslavia). Selama berabad-abad Kosovo menjadi jajahan Kekaisaran Turki Ottoman. Penguasa Turki pada abad ke-17 mendatangkan penduduk Albania (yang muslim) untuk menghadapi mayoritas Serbia (Kristen Ortodoks) ke wilayah tersebut..1 Dan sampai saat ini mayoritas penduduk Kosovo adalah muslim dan sekitar 7

Pada masa Yoseph Bros Tito memerintah Yugoslavia, beliau memperkenalkan Sosialisme ala Yugoslavia atau Self Management Socialism, yang berisi kebijakan ekonomi pasar, dan pemberian otonomi yang khusus pada wilayah tertentu. Di tahun 1946 Tito berusaha mengintegrasikan Kosovo ke dalam Republik Federal Yugoslavia dan pada tahun 1946, Tito memberikan status “propinsi otonom” dengan nama Kosovo-Metohija (KOSMET), baru pada tahun 1968 kembali ke nama Kosovo . Pemberian otonomi yang luas baik berupa teritorial maupun cultural membuat posisi Kosovo sejajar dengan republik-republik lain di Republik Federasi Yugoslavia. Dan menjadikan Kosovo berwenang untuk mempunyai parlemen serta kepala eksekutif sendiri.

Selain itu Kosovo mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, kebudayaan, pendidikan, kesejahteraan, dan bahasa sendiri. Namun, pelaksanaan liberalisasi dan desentralisasi yang diterapkan Tito menimbulkan konsekuensi politik yang serius. Nasionalisme mulai tumbuh di beberapa wilayah Republik Fedarasi Yugoslavia yang menyebabkan perbenturan kepentingan antar satu etnis dengan etnis yang lainnya dan salah satunya adalah konflik antara etnis Albania di Kosovo dan Serbia.

Beberapa periode selanjutnya Yugoslavia dipimpin oleh Slobodan Milosevic dimulai akhir tahun 1980an. Salah satu kebijakan Milosevic yang mencolok adalah diskriminasi terhadap etnik Albania di wilayah Kosovo. Diskriminasi tersebut dilakukan baik dalam diskriminasi politik, sosial maupun budaya. Hal itu diperlihatkan dengan tidak diikutsertakannya warga etnik Albania yang berada di Kosovo dalam kaneah pemerintahan baik duduk

dalam jabatan pemerintahan maupun dalam pemilu. Selama puluhan tahun hak-hak mereka dikebiri.

Pada awalnya propinsi Kosovo secara de facto merupakan bagian dari wilayah Serbia yang mana adalah sebuah negara pecahan Republik Federasi Yugoslavia (sebelum tahun 2003 Serbia bernama Yugoslavia). Selama berabad-abad Kosovo menjadi jajahan Kekaisaran Turki Ottoman. Penguasa Turki pada abad ke-17 mendatangkan penduduk Albania (yang muslim) untuk menghadapi mayoritas Serbia (Kristen Ortodoks) ke wilayah tersebut..² Dan sampai saat ini mayoritas penduduk Kosovo adalah muslim dan sekitar 7 persennya merupakan etnis Serbia.

Pada tahun 1989 Milosevic mencabut otonomi khusus wilayah Kosovo dan membuatnya sejajar dengan wilayah lain. Hal itu menyebabkan pukulan yang keras bagi etnis Albania. Perbedaan etnis dan agama serta politik diskriminasi Serbia terhadap Kosovo mendorong keinginan Kosovo untuk melepaskan diri dari Serbia. Di bulan Juli 1990 warga Albania Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya bersamaan dengan republik-republik lain bekas Republik Federasi Yugoslavia setelah sebuah referendum rahasia dilangsungkan. Untuk pertama kalinya pada tahun 1991 Kosovo menyelenggarakan pemilu yang terpisah dari campur tangan Beograd. Namun sayangnya, deklarasi ini tidak berhasil mendapat persetujuan dari Serbia tetapi justru menimbulkan reaksi keras dari Belgrade. Perlawanan rakyat Kosovo

Liberation Army). Mulai saat itu berbagai bentuk perlawanan rakyat Kosovo terhadap pemerintah Serbia diwakili oleh KLA.

Perselisihan antara KLA dan tentara Serbia terlihat meruncing pada bulan Oktober 1998, dimana keduanya terlihat lebih intensif dalam melakukan baku hantam. Laporan-laporan mengenai segala bentuk penindasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Serbia terhadap etnis Albania mengundang perhatian internasional. Masyarakat internasional berusaha untuk mendamaikan pertikaian antara Serbia-Kosovo dengan mengadakan pertemuan di Rambouillet, Prancis, pada bulan Februari 1999 antara pemerintah Serbia dan wakil etnis Albania. Dalam pertemuan yang digagas oleh masyarakat internasional ini, menyebutkan bahwa akan mengupayakan Kosovo akan tetapi menjadi bagian Yugoslavia, tetapi NATO sebagai pemimpin pasukan perdamaian internasional akan memberikan bantuan keamanan. NATO merancang pemberian kewenangan untuk mendirikan pemerintahan sendiri bagi propinsi tersebut. Dengan kata lain masyarakat internasional akan membagi delegasi negara Serbia menjadi Serbia, Kosovo etnis Albania, serta Metohija.³ Namun, pada akhirnya perundingan ini mengalami jalan buntu karena Milosevic dengan tegas menolak rencana damai ini.

Puncak perlawanan orang Albania di Kosovo terjadi pada bulan Maret 1999, keinginan untuk kemerdekaan Kosovo dan Metohija ditanggapi Milosevic dengan penyerbuan tentara Serbia ke wilayah ini. Kemarahan ini dilanjutkan dengan penyerangan oleh militer, polisi Yugoslavia terhadap

Tentara Pembebasan Kosovo atau *Kosovo Liberation Army* (KLA) secara intensif. Rezim Belgrade menargetkan serangan kepada para personel militer KLA dan warga sipil Albania yang dianggap mendukung KLA. Menghadapi pendirian Milosevic yang begitu keras, dan perkembangan konflik yang berpotensi pada bencana besar kemanusiaan di propinsi itu, NATO Dengan dukungan AS melancarkan serangan ke wilayah Kosovo untuk mengusir tentara Serbia itu tanpa mandat resmi dari PBB.

Beberapa saat setelah operasi pengeboman yang dilakukan NATO atas prakarsa Amerika dan Clinton (presiden AS yang menjabat pada waktu itu) menyatakan bahwa:

"Penghentian pengeboman yang dilakukan NATO adalah kondisional tergantung pada hasil yang dicapai dari salah satu atas dua hal berikut: Apakah Milosevic mau menerima perundingan damai atau melakukan pengurangan terhadap kekuatan militer Serbia".

Dan Bagi Serbia tidak diharapkan salah satu dari dua syarat tersebut akan dilaksanakan, karena tidak mungkin bagi Milosevic untuk menerima perundingan damai hal ini berarti mengizinkan pasukan NATO berada di Kosovo yang akan mengakibatkan kemerdekaan propinsi itu. Dan Serbia tak juga akan mengurangi kekuatan militer Serbia karena posisi mereka sangat penting. Oleh karena itu, Amerika dan negara-negara yang bergabung dengan NATO menolak perantaraan dan tawaran Serbia agar NATO menghentikan pengeboman yang mereka lakukan, dan kembali pada kesepakatan Milosevic untuk mengizinkan pasukan Serbia di propinsi tersebut serta mengembalikan

Tekanan dunia internasional dan NATO selanjutnya membuat Serbia secara sepihak mengumumkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang ini. Selama 78 hari serangan NATO ke wilayah Kosovo tercatat ribuan etnis Albania terbunuh dan lebih dari satu juta orang menjadi pengungsi atau kehilangan tempat tinggal di propinsi tersebut. Beberapa ribu orang Serbia juga terbunuh dan terluka dalam serangan udara NATO, yang membawa kerusakan yang lebih luas pada infrastruktur militer maupun sipil di Yugoslavia.

Berakhirnya serangan udara NATO, pada pertengahan Juni 1999 diikuti penarikan mundur pasukan NATO dari Kosovo dan militer maupun polisi Yugoslavia untuk meninggalkan tempat ini. Kemudian masyarakat internasional mengambil alih pemerintahan di Kosovo untuk mendirikan administrasi sipil dan keamanan di bawah pengawasan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, memberikan wewenang kepada pasukan perdamaian PBB untuk ditempatkan dibawah kontrol masyarakat internasional, dan juga tidak akan ada perubahan pada status Kosovo hingga beberapa waktu. Tetapi mengenai masa depan Kosovo akan berada di bawah administrasi PBB, dengan NATO sebagai pasukan pertahanan multinasional menempatkan KFOR (Kosovo Force) untuk menjaga keamanan di propinsi tersebut.

Semenjak Kosovo berada dibawah pemerintahan PBB upaya perdamaian ataupun pembahasan masa depan status wilayah ini tetap dilakukan. Negosiasi yang alot antara kedua belah pihak hanya membuat situasi yang tidak kunjung membaik. Hal ini memaksa dimunculkannya

seorang aktor penengah yang dapat memberikan solusi dalam persoalan ini. Adalah Martti Ahtisaari seorang diplomat senior utusan PBB, special Envoy maupun perwakilan Uni Eropa berusaha menengahi perundingan status wilayah Kosovo dengan mengajukan sebuah proposal perdamaian bagi kedua belah pihak. Ahtisaari menegaskan bahwa tujuan dari proposal itu adalah memberikan landasan yang kuat bagi penentuan masa depan Kosovo yang stabil dan aman. Proposal itu berisikan rancangan kemerdekaan bagi Kosovo, dengan bentuk kemerdekaan yang akan diberikan kepada Kosovo yaitu berupa bergabung dengan Lembaga-Lembaga Internasional (PBB, IMF, World Bank).

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada pertengahan tahun 2007 mengusahakan penundaan empat bulan sebelum mengadakan rencana kemerdekaan bagi propinsi Kosovo. Rancangan ini merupakan putaran akhir babak perundingan mengenai status wilayah ini. Jeda tersebut memungkinkan Beograd dan etnik Albania melanjutkan pembicaraan mengenai penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Setelah 120 hari jika pembicaraan gagal, resolusi tersebut secara otomatis akan mulai memberlakukan rancangan kemerdekaan yang disusun oleh Ahtisaari kecuali Dewan Keamanan dengan jelas memutuskan sebaliknya setelah melakukan evaluasi.

Jeda yang diberikan untuk perundingan akhirnya tidak menghasilkan keputusan apapun hingga di penghujung tahun 2007 kedua belah pihak tetap bertahan dengan posisi masing-masing. Perundingan di Wina, Austria, yang berlangsung pada bulan November 2007 yang dihadiri oleh para diplomat

internasional dan negara-negara pemegang hak veto termasuk AS dan Rusia, melakukan pembahasan mengenai resolusi bagi wilayah ini pada akhirnya juga gagal menentukan nasib propinsi Kosovo. Serbia tetap ingin mempertahankan wilayah tersebut di dalam teritorialnya dan mendapat dukungan penuh dari Rusia yang menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Rusia menilai bahwa pemberian kemerdekaan bagi Kosovo dapat memicu tindakan separatisme etnis lain di wilayah sekitarnya. Sedangkan Kosovo sejak awal mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan sebagian anggota Uni Eropa serta yang dianggap sebagai satu-satunya solusi yang memungkinkan penyelesaian pertikaian wilayah tersebut.

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, pada akhirnya tanggal 17 Februari 2008 Kosovo secara unilateral memproklamasikan kemerdekaannya. Deklarasi ini disampaikan oleh PM Hashim Thaci setelah sebelumnya dilakukan sidang luar biasa parlemen Kosovo melalui voting. Kosovo berani memisahkan diri dari Serbia setelah di back-up penuh oleh Amerika dan sekutunya. Sudah dapat dipastikan bahwa Serbia bereaksi keras dalam menanggapi kemerdekaan Kosovo.

PM Serbia Vojislav Kostunica menyebut Kemerdekaan Kosovo secara sepihak merupakan illegal, Serbia juga menyatakan negaranya tidak akan pernah mengakui kedaulatan Kosovo. Belgrade menegaskan bahwa Kosovo tetap merupakan bagian dari wilayah Serbia dan akan menghadang semua upaya Kosovo menjadi anggota PBB maupun organisasi internasional lainnya.

Langkah Serbia ini mendapat dukungan dari Rusia yang juga menolak

mengakui kemerdekaan Kosovo. Rusia menganggap kemerdekaan tanpa persetujuan PBB merupakan preseden yang berbahaya dan tidak sah. Rusia menyatakan agar DK PBB tidak menerima pernyataan itu dan memperingatkan meningkatnya kekerasan etnis di wilayah Balkan. Cina yang juga merupakan anggota DK PBB termasuk dalam barisan negara yang menolak mengakui kemerdekaan Kosovo. Cina khawatir deklarasi itu akan menciptakan kekacauan di Balkan.

Deklarasi ini banyak memunculkan pro dan kontra di dunia internasional. Pemisahan diri Kosovo menjadi menarik mengingat klaim yang diajukan Serbia dan kemungkinan pengakuan internasional bagi negara tersebut. Sejauh ini yang secara tegas mengakui kemerdekaan Kosovo adalah AS dan sejumlah besar negara Uni Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda, Turki, Polandia, Jerman, Italia, dll. Namun, bagi sejumlah besar negara lainnya, pengakuan kemerdekaan justru menjadi dilema tersendiri, karena hal tersebut sama saja dengan membenaran terhadap kemungkinan pelepasan diri dari wilayahnya. Sejumlah negara seperti Bulgaria, Cyprus, Spanyol, Rumania, dan Yunani berkeberatan untuk memberi pengakuan kepada Kosovo.

Di lain pihak, Amerika Serikat sangat mendukung penuh kemerdekaan Kosovo. Bersama negara-negara Uni Eropa, AS menegaskan pengakuannya terhadap kedaulatan Kosovo.⁷ Sejak awal, AS selalu berada di barisan terdepan pendukung kedaulatan Kosovo dan juga berperan dalam upaya-upaya memerdekakan wilayah ini. Bahkan, pada waktu invasi NATO ke wilayah Kosovo, AS yang mempunyai kepemimpinan efektif di organisasi ini,

memberi izin kepada NATO dalam aksi tersebut. AS sangat represif dan ingin membantu Kosovo keluar dari cengkraman Serbia.

Presiden AS, George W Bush, menegaskan mendukung penuh kemerdekaan Kosovo karena akan membawa perdamaian di wilayah Balkan. AS juga akan menjamin kondisi keamanan Kosovo dengan mengirim pasukan ke wilayah itu. Pada bulan Maret, Uni Eropa akan mengirimkan 2.000 pasukan dan ahli hukum untuk menggantikan pasukan PBB, sedangkan 16.000 pasukan NATO bertahan di sana.⁸ Selama ini, sebelum Kosovo memerdekakan diri, AS selalu memberikan dukungan penuh terhadap upaya kemerdekaan Kosovo baik itu melalui perang media ataupun di meja perundingan.

D. POKOK PERMASALAHAN

Kemerdekaan Kosovo secara Unilateral dari Republik Serbia telah menyebabkan pro dan kontra di dunia internasional. Beberapa negara menolak mengakui kemerdekaan ini, namun AS sebagai salah satu negara anggota pemegang hak veto, malah menyatakan dukungan penuh atas kemerdekaan wilayah ini. Sehingga pokok permasalahannya adalah :

----- AS memberikan dukungan penuh atas kemerdekaan Kosovo

E. KERANGKA TEORI

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan teori yang dianggap tepat dan mampu menjembatani, serta memudahkan kita dalam mempelajari dan menganalisa permasalahan tersebut.

Kerangka dasar teori yang digunakan yaitu :

Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara dijelaskan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai berikut :¹

Foreign Policy is a strategy or planed course of action develop the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms international interest.

Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri juga dikemukakan oleh William D. Coplin sebagai berikut :

To be Interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be a mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers state. The second is the economy and military capability of state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self specially in relation to the other state in system.²

¹ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, New York: Holt, Richard, and Winston, hal 127.

² William D. Coplin, *Introduction to International Politic: A Theoretical Overview*, Terjemahan M.Marbum, Sinar Baru, Bandung, 1991.

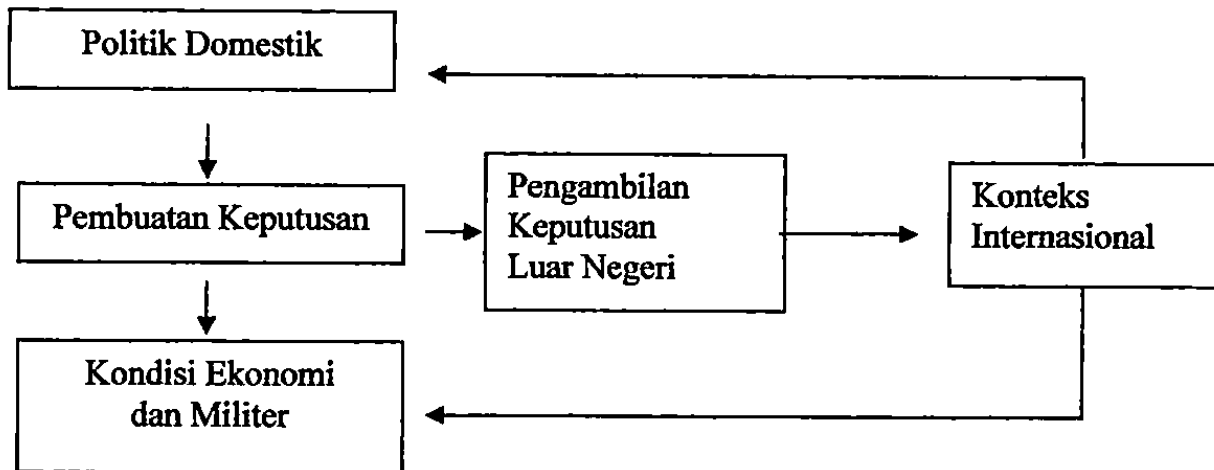
Menurut Coplin ada tiga faktor yang melatarbelakangi pembuatan keputusan luar negeri :

1. Kondisi politik dalam negeri negara tersebut. Termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik negara tersebut. Politik luar negeri Amerika Serikat lebih didasarkan atau dipengaruhi oleh berbagai kepentingan nasional negara Amerika Serikat.
2. Kondisi ekonomi dan militer dari negara tersebut. Kemampuan diplomasi di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Kondisi ekonomi politik Amerika Serikat secara makro menentukan kondisi perekonomian dunia.
3. Konteks internasional (*International Context*), kondisi-kondisi internasional pada saat itu termasuk yang berbatasan dengan satu negara akan mendasari tindakan luar negeri dari negara tersebut. Konteks internasional adalah suatu tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang yang mungkin akan diantisipasi.

Gambar berikut ini mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri :

Diagram 1.1

Interaksi antar faktor dalam proses pembuatan politik luar negeri



Sumber : William D. Coplin, *Introduction to International Politics*, terjemahan M.Marbun, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri (*the Decisions Making Process*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil dari berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai dalam mencapai tujuan yang mereka tetapkan.³

Bagi para *policy makers* di Gedung Putih, pengambilan keputusannya untuk mendukung maupun mengakui kemerdekaan Kosovo dipengaruhi oleh

³ Mochtar Mas'ud, *Hubungan Internasional Dinamis dan Metodologi IPS*, Jakarta, 1990.

empat faktor, yaitu: kondisi ekonomi, militer, politik, dan konteks internasional.

Hingga saat ini negara-negara eks Yugoslavia walaupun telah merdeka tetapi mereka masih tergantung dengan negara-negara Barat, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Mereka masih mengandalkan bantuan dari negara-negara Barat seperti AS. Bantuan ekonomi AS difokuskan untuk melakukan reformasi pasar.⁴ Maka, dengan pengupayaan kemerdekaan bagi Kosovo, AS yang merupakan negara penganut ideologi Kapitalisme berusaha mengarahkan kebijakan ekonomi Kosovo dalam sistem terbuka atau kapitalisme.

Selain dilakukan penerapan sistem Kapitalisme di Kosovo, AS ingin memantapkan pembangunan pangkalan militer di wilayah Balkan dan salah satunya di wilayah Kosovo. Sebagai posisi sentral di wilayah Balkan, Kosovo mempunyai arti khusus bagi AS dalam rangka pengawasan semenanjung Balkan. Kehadiran pasukan NATO yang dipimpin oleh Amerika di Kosovo-Metohija (KOSMET) dengan memasang pasak di tengah-tengah Balkan (AS telah membangun kompleks militer secara permanen dengan daya tampung 10.000 personil berikut fasilitas dan peralatan tempurnya) , maka AS dan NATO telah menduduki posisi yang sangat strategis karena memiliki "batu loncatan" untuk akses-akses selanjutnya di kawasan Balkan termasuk ke

⁴ www.state.gov//CRS Report for Congress RL31053, *Future of the Balkans and U.S. Policy Concern* , by Julie Kim and Steven Wohrel, diakses tanggal 24 Maret 2008.

daerah-daerah yang lebih jauh misalnya bagian Utara dan bagian Timur kawasan Balkan dan kawasan laut Hitam.⁵

Pengakuan kemerdekaan terhadap Kosovo pada kenyataannya memperoleh dukungan politik secara luas di dalam negeri. Kalangan kongres dan senat memberikan dukungan atas upaya kemerdekaan maupun pengakuan kemerdekaan bagi Kosovo. Dalam sidang kongres Amerika ke-108, kongres memasukan pembahasan pengaturan perundang-undangan mengenai status Kosovo.⁶ Kongres memberikan dukungan bagi kemerdekaan Kosovo, karena kongres memandang bahwa dukungan bagi Kosovo akan banyak memberikan keuntungan politik. Secara politik, dengan mendukung penegakan demokrasi di negara-negara eks Yugoslavia yang baru merdeka ini, AS akan menunjukkan bahwasanya AS tetap mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan negara-negara eks Yugoslavia.

Hal itu telah diimplentasikan oleh AS dengan menentang pelanggaran HAM yang terjadi di Kosovo. Dengan mendukung penegakan demokrasi di Kosovo, AS dapat memantapkan posisinya untuk menanamkan sistem demokrasi pada negara baru tersebut. Yang mana dengan hal itu dapat mendorong terciptanya sebuah sistem baru dan mampu meninggalkan sitem yang lama. Sistem lama warisan komunisme yang digunakan oleh negara-

⁵ <http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel5/balkanisasi1.htm>, *Balkanisasi Korban Perang Modern, Akankah menimpa NKRI?*, diakses 2 November 2007.

⁶ [www.state.gov//CRS Report for Congress RL31053](http://www.state.gov//CRS%20Report%20for%20Congress%20RL31053), *Future of the Balkans and U.S. Policy*

negara eks Yugoslavia, akan bergeser mengikuti sistem Eropa-Atlantik yang menerapkan sistem demokrasi, liberalisme, dan kapitalisme gaya Barat.

Sedangkan konteks internasional yang sangat mempengaruhi para *Policy makers* AS untuk mendukung kemerdekaan Kosovo adalah faktor Rusia. Rusia sebagai negara pewaris Uni Soviet yang masih dipandang berpotensi mengancam kepentingan politik AS di wilayah Balkan. AS melihat Rusia masih memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Balkan. Dan Yugoslavia dan lebih khusus Republik Serbia dan Republik Montenegro yang tetap loyal pada Rusia dan telah menjalin kerjasama yang baik dengan Rusia. Dengan memberikan dukungan kemerdekaan bagi Kosovo, maka hal itu dapat memperlemah posisi Serbia dari Yugoslavia dan mengisolasinya dari Rusia. Maka usaha untuk mengurangi peran Rusia di wilayah ini akan mudah diraih. Dan dengan hilangnya kepentingan dan ikatan dengan negara-negara di kawasan Eropa Timur, maka Rusia akan kehilangan peran regionalnya di Eropa.

F. HIPOTESIS

Amerika meberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Kosovo atas Serbia karena: AS mempertimbangkan faktor politik domestik, ekonomi, dan militer yang dapat mengakibatkan pengaruhnya di kalangan negara-

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Batas waktu permasalahan yang menjadi perhatian penulis yaitu dimulai tahun 1998-2008. Pada tahun 1998 terjadinya penyerangan Serbia ke Kosovo terhadap Tentara Pembebasan Kosovo (KLA). Yang pada akhirnya mengundang campur tangan pihak asing, yaitu NATO (1999). Semenjak tahun 1999 Kosovo berada di bawah pengawasan PBB dengan pasukan Keamanannya. Setelah itu upaya perundingan perdamaian terus dilakukan hingga tahun 2007, selama itu pula AS selalu mendukung pemberian kemerdekaan bagi Kosovo. Sedangkan di tahun 2008 ini Kosovo pada akhirnya memproklamasikan diri, yang menyebabkan pro dan kontra diantara negara-negara anggota Uni Eropa maupun anggota PBB.

H. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library Research*, yaitu dengan memanfaatkan data-data skunder yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, majalah, dan media tertulis.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab. I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran penulisan, yaitu: *Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Jangkauan Penelitian.*

Bab. II. POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO

Dalam bab ini akan mendiskripsikan mengenai kerangka politik luar negeri AS dan penerapannya secara umum. Dalam sub bab ini akan dijelaskan pula mengenai politik luar negeri AS di wilayah Balkan khususnya terhadap Kosovo selama tiga periode pemerintahan presiden, yaitu era Presiden George H. W. Bush, Bill Clinton, dan yang terakhir adalah masa pemerintahan George W. Bush.

Bab. III. PERKEMBANGAN POLITIK KOSOVO (1918-2008)

Bab III akan berisi mengenai sejarah dan perkembangan politik Kosovo dari awal pembentukan negara Federasi Yugoslavia hingga upaya-upaya melepaskan diri dari cengkaman kekuasaan Serbia hingga saat ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Kondisi dan perkembangan politik Kosovo akan diuraikan dalam empat periode yaitu, pertama pada masa kekuasaan presiden FRY Yoseph Bros Tito, kedua pada masa pemerintahan presiden Serbia, Slobodan Milosevic, periode ketiga ketika berada di bawah administrasi internasional, dan yang terakhir kondisi politik Kosovo setelah menjadi negara yang mempunyai kedaulatan.

Bab. IV. KEPENTINGAN AS ATAS KEMERDEKAAN KOSOVO

Bab IV berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi AS memberikan dukungan penuh atas kemerdekaan Kosovo. Dan berbagai kepentingan AS di wilayah eks Yugoslavia yaitu meliputi kepentingan

ekonomi, politik, militer yang bertujuan mengukuhkan pengaruhnya di kalangan negara-negara eks Yugoslavia.

Bab. V. KESIMPULAN